

## **Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah**

Volume 3 No 2 (Agustus 2020): 149-179

ISSN: [2087-8761](#) E-ISSN: [2442-8248](#)

Website: <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/md/>

---

### **Analisis Makro Ekonomi Kabupaten Pohuwato**

Sulha Ali, Andi Mardiana

(Kementerian Agama Kabupaten Bonebolango, IAIN Sultan Amai Gorontalo)

[sulhaali781@gmail.com](mailto:sulhaali781@gmail.com), [andimardianabone@gmail.com](mailto:andimardianabone@gmail.com)

---

**Abstract:** The macroeconomic indicators used as the basis for planning and evaluation for the development process in Pohuwato Regency are economic growth, inflation, TPAK, open unemployment, poverty levels, HDI, Gini ratio, ICOR, consumption growth, investment growth, and growth in government spending. Output multiplier and sectoral inequality. One indicator of the level of prosperity of the population in an area / region can be seen from the per capita GRDP value, which is the quotient between the added value generated by all economic activities and the population. Therefore, the size of the population will affect the value of PDRB per capita, while the size of the value of GRDP is highly dependent on the potential of natural resources and production factors in the area. PDRB per capita based on current prices shows the value of PDRB per head or per one population. Pohuwato's PDRB per capita value at the prevailing price from 2015 to 2019 has always increased. In 2015 the per capita GRDP was recorded at 31.11 million rupiah. In nominal terms, it continues to increase until 2019 reaching 41.04 million rupiah.

**Keywords:** Analysis; Macro Economics; Pohuwato Regency

**Abstrak:** Indikator-indikator makro ekonomi yang digunakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi bagi proses pembangunan di Kabupaten Pohuwato adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, TPAK, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, IPM, Gini ratio, ICOR, pertumbuhan konsumsi, pertumbuhan investasi, dan pertumbuhan pengeluaran pemerintah. Angka pengganda output dan ketimpangan sektoral. Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Pohuwato atas dasar harga berlaku sejak tahun 2015 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 PDRB per kapita tercatat sebesar 31,11 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 41,04 juta rupiah.

**Kata kunci:** Analisis; Makro Ekonomi; Kabupaten Pohuwato

## **Pendahuluan**

Kabupaten Pohuwato mempunyai sistem pemerintahan yang sama dengan kabupaten lainnya. Unit pemerintahan di bawah kabupaten secara langsung adalah kecamatan. Masing-masing kecamatan terdiri dari beberapa desa. Kabupaten Pohuwato sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Boalemo. Kemudian, melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003, Pohuwato dimekarkan menjadi sebuah kabupaten yang otonom. Sejak berdirinya, Kabupaten Pohuwato telah terjadi perkembangan yang cukup signifikan dalam bidang pemerintahan, dimana pada awalnya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan sekarang telah berkembang menjadi 13 kecamatan.

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik pendapatan nasional/regional secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi. Angka juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

Pembangunan Daerah di Era Otonomi dimulai dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri untuk lebih memajukan dan melakukan pembangunan di daerah masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka masing-masing daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam menjalankan proses pembangunan daerahnya. Antara lain dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan. Maka setiap daerah harus mampu berkreasi dan mengoptimalkan outputnya guna meningkatkan kemajuan dan kemandirian daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Tabel 1  
PDRB ADHK Kab. Pohuwato Tahun 2015-2019  
(Milyar)

<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
3 577,85	3 815,58	4 074,28	4 338,23	4 611,06

*Sumber: Kabupaten Pohuwato Dalam Angka 2020*

Dalam rangka pencapaian sasaran dan target pembangunan yang diharapkan maka implementasi pembangunan ekonomi di Kabupaten Pohuwato harus didasarkan atas Indikator makro ekonomi. Oleh karena itu penyusunan Analisis Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Pohuwato memiliki peran dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah.

Maksud dari disusunnya tulisan ini adalah untuk menyediakan referensi yang berisi data dan informasi dasar yang dapat merepresentasikan kondisi pembangunan ekonomi Kab. Pohuwato yang terukur berdasarkan indikator-indikator makro ekonomi. Indikator-indikator makro ekonomi yang digunakan dalam tulisan ini antara lain yaitu; Produk Domestik Bruto, PDRB Per Kapita, Inflasi, Ketenagakerjaan, Kemiskinan, Rasio Gini, dan Indeks Pembangunan Manusia.

### **Konsep dan Kondisi Makro Ekonomi**

Indikator makro ekonomi adalah statistik yang digunakan untuk melihat perkembangan ekonomi saat ini dan saat yang akan datang. Statistik tersebut diterbitkan secara periodik (umumnya harian, bulanan, maupun tahunan) oleh pemerintah, lembaga - lembaga ataupun organisasi - organisasi swasta. Indikator makro ekonomi tersebut dipublikasikan berdasarkan atas pengamatan terhadap industri - industri, wilayah/daerah, ataupun negara.

Fungsi utama indikator makro ekonomi adalah untuk menganalisis perkembangan ekonomi saat ini dan untuk memprediksi perkembangan ekonomi di masa yang akan datang. Fungsi lain dari indikator makro ekonomi adalah untuk mengatur atau mengubah ekspektasi pasar. Oleh sebab itu, indikator makro ekonomi dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pasar barang dan jasa, pasar tenaga kerja, pasar valuta asing, pasar saham, dan pasar bursa berjangka.

Terdapat indikator-indikator makro ekonomi yang perlu untuk diamati. Indikator-indikator yang dimaksud adalah PDRB, tingkat inflasi, Indeks Pembangunan

Manusia (IPM), PDRB per kapita, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, tingkat kesempatan kerja dan tingkat pengangguran.

### **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Secara umum Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. PDRB disajikan atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku. PDRB atas dasar harga berlaku menceritakan nilai ekonomi yang tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan volume produksi tetapi juga dipengaruhi oleh inflasi (harga).

Melalui distribusi nilai PDRB atas dasar harga berlaku dapat diketahui struktur perekonomian suatu wilayah. Selain itu kinerja perekonomian daerah yang dinilai dari pertumbuhan ekonominya dapat diketahui melalui perkembangan nilai PDRB atas dasar harga konstan.

Ada beberapa manfaat dari penghitungan PDRB antara lain, untuk melihat keterbandingan antar daerah, untuk melihat kesenjangan ekonomi antar daerah dan antar sektor, untuk melihat potensi ekonomi yang masih bisa dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian di masing-masing daerah, PDRB juga digunakan sebagai salah satu komponen dalam pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU).

### **Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu atau bisa juga digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu daerah pada suatu periode tertentu. LPE ini dihitung berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan. Rumusnya adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{Y_{it} \times 100\%}{Y_{it-1}} - 100\%$$

Dimana :

r = laju pertumbuhan (%)

Y<sub>it</sub> = PDRB adhk tahun ke – t (nominal)

Y<sub>it-1</sub> = PDRB adhk tahun sebelumnya (nominal)

### *Peranan/Kontribusi Sektor Ekonomi*

Persentase (proporsi) masing-masing sektor terhadap total PDRB ADHB, Peran/kontribusi masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah; melihat struktur perekonomian suatu wilayah.

### *Sumber Pertumbuhan Ekonomi*

Seberapa besar bagian dari masing-masing sektor dalam penciptaan total laju pertumbuhan ekonomi. Rumus yang digunakan adalah :

$$SOGit = \frac{Y_{it} - Y_{it-1}}{Y_{it-1}} \times 100\%$$

- SOGit = laju pertumbuhan sektor ke i pada tahun ke t (%)  
Yit = PDRB adhk sektor ke-i pada tahun ke – t (nominal)  
Yit-1 = total PDRB adhk pada tahun sebelumnya (nominal)

PDRB per kapita merupakan besaran untuk menunjukkan besarnya pendapatan yang dapat dinikmati oleh setiap penduduk secara rata-rata selama satu tahun. PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi PDRB total Atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun.

### **Inflasi**

Untuk mengukur perubahan harga dari dua periode waktu yang berbeda digunakan angka indeks harga. Angka indeks harga adalah angka yang menunjukkan perbandingan harga dalam dua waktu yang berbeda, sehingga angka indeks harga didefinisikan sebagai angka perbandingan antara harga komoditi atau kelompok komoditi yang terjadi pada suatu periode waktu dengan periode waktu yang telah ditentukan. Karena data harga yang digunakan adalah harga konsumen, maka indeks harga yang digunakan adalah Indeks Harga Konsumen (IHK).

### **Ketanagakerjaan**

Konsep pengumpulan data angkatan kerja yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan *the labour force concept* yang direkomendasikan oleh *International Labour Organization* (ILO). Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok yaitu penduduk yang termasuk ke dalam usia kerja dan bukan usia kerja.

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kondisi ketenagakerjaan di suatu daerah adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang dapat mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah.

TPAK dihitung dengan membandingkan data angkatan kerja dengan data penduduk usia kerja. Semakin tinggi nilai TPAK menunjukkan proporsi angkatan kerja yang semakin membesar pada struktur demografi suatu wilayah. Dengan melihat TPAK dapat ditunjukkan perbandingan persentase penduduk yang telah dan siap untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi. Namun demikian, tingginya TPAK tidak selalu berarti membaiknya kinerja ketenagakerjaan. Apabila tingginya TPAK diikuti oleh peningkatan dalam proporsi penduduk bekerja, maka TPAK tersebut menunjukkan kinerja partisipasi angkatan kerja yang baik. Sebaliknya, bila tingginya TPAK diikuti oleh peningkatan penduduk pencari kerja, maka dikhawatirkan akan memicu tingginya angka pengangguran.

### **Kemiskinan**

Di Indonesia, konsep mengenai kemiskinan tersebut diadopsi dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Besaran nilai kebutuhan dasar minimum tersebut ditentukan dengan menggunakan Garis Kemiskinan (GK), yaitu batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi makanan dan bukan makanan. Adapun besaran GK yang selama ini digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terdiri dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan makanan (GKNM).

Untuk mendapatkan GK di tingkat provinsi, BPS terlebih dahulu menentukan kelompok acuan sebanyak 20 persen dari penduduk dengan nilai konsumsi yang berada di atas garis kemiskinan sementara (GKS). GKS adalah GK pada periode sebelumnya yang telah dikalikan dengan faktor inflasi. Dari kelompok acuan tersebut kemudian dilakukan penghitungan nilai konsumsi terhadap 52 komoditas makanan yang kemudian disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung rata-rata kalori dari ke-52 komoditas tersebut. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh GKM. Selanjutnya GKM tersebut disetarakan dengan 2.100 kilokalori dengan mengalikan 2.100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah dari penduduk referensi.

Adapun GKNM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/subkelompok nonmakanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/subkelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/subkelompok

yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Selanjutnya, penjumlahan dari GKM dan GKNM menghasilkan GK. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin.

*Ukuran Kemiskinan:*

*Head Count Index (HCI-P0)* adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK). Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

IPM mengukur pencapaian pembangunan manusia dalam tiga dimensi. Ketiga dimensi tersebut adalah dimensi umur panjang dan sehat, dimensi pengetahuan dan kehidupan yang layak.

Tabel 1  
Dimensi, Indikator dan Indeks Pembangunan Manusia  
Metode Lama dan Metode Baru

DIMENSI	METODE LAMA		METODE BARU	
	UNDP	BPS	UNDP	BPS
<b>Kesehatan</b>	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)
<b>Pengetahuan</b>	1. Angka Melek Huruf (AMH)	1. Angka Melek Huruf (AMH)	1. Harapan Lama Sekolah (HLS)	1. Harapan Lama Sekolah (HLS)
	2. Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK)	2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
<b>Standar Hidup Layak</b>	PDB per kapita	Pengeluaran per kapita	PNB per kapita	Pengeluaran per kapita
<b>Agregasi</b>	<b>Rata-rata Hitung</b> $IPM = \frac{1}{3} (I_{kesehatan} + I_{pengetahuan} + I_{pendapatan})$		<b>Rata-rata Ukur</b> $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pengetahuan} \times I_{pendapatan}}$	

Angka harapan hidup pada saat lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut kelompok umur.

- Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berumur 25 tahun atau lebih untuk menempuh suatu jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani.

- Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.
- Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

### **Teori Perekonomian Terbuka**

Perekonomian terbuka / perekonomian empat sektor merupakan perekonomian suatu negara yang mempunyai hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Dalam perekonomian terbuka sebagian produksi dalam negeri diekspor atau dijual ke luar negeri dan disamping itu terdapat pula barang di negara itu yang diimpor dari negara-negara lain. Perekonomian terbuka dapat diformulasikan sebagai berikut:  $Y = C + I + G + (X-M)$ , dengan Y adalah output (*income*). C adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga, I adalah pengeluaran investasi sektor bisnis, G adalah pengeluaran pemerintah. X adalah ekspor, M adalah impor. Syarat keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka adalah  $Y = C + I + G + (X - M)$  dan  $I + G + X = S + T + M$ .

Persamaan  $Y = C + I + G + (X-M)$  dapat dimodifikasi menjadi  $NX = Y - (C + I + G)$ . dengan  $(C + I + G)$  adalah pengeluaran domestik. Suatu perekonomian akan mengalami surplus perdagangan apabila output lebih besar dari pengeluaran domestik, atau ekspor lebih dari impor. Sebaliknya, suatu perekonomian akan mengalami defisit perdagangan apabila output kurang dari pengeluaran domestik, atau ekspor kurang dari impor.

Variabel-variabel sebagaimana dijelaskan merupakan variabel-variabel makro ekonomi. Variabel-variabel tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri, namun saling mempengaruhi satu sama lain. Apabila salah satu variabel berkinerja buruk, maka hal tersebut dapat memberikan pengaruh negatif terhadap variabel lain. Namun, apabila variabel lain berkinerja lebih baik, dan lebih dominan, maka variabel makro ekonomi yang berkinerja baik tersebut sangat mungkin dapat memperbaiki variabel makro ekonomi yang berkinerja buruk.

Apabila suatu perekonomian terbuka menemui masalah, yakni terdapat variabel-variabel makro ekonomi yang tidak berkinerja baik, maka perekonomian tersebut dapat menerapkan kebijakan makro ekonomi, yakni kebijakan fiskal atau kebijakan moneter. Kebijakan fiskal berkaitan dengan pengelolaan anggaran



pendapatan dan belanja pemerintah, sedangkan kebijakan moneter adalah pengelolaan terhadap jumlah uang beredar. Kebijakan yang bersifat ekspansif akan diambil oleh suatu perekonomian manakala permasalahan lebih kepada bagaimana menciptakan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, kebijakan yang bersifat kontraktif diambil untuk mengatasi gejolak kenaikan harga-harga secara umum.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau penelitian arsip yang memuat peristiwa masa lalu. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pengolahan pihak kedua atau data yang diperoleh dari hasil publikasi pihak lain yaitu data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo, khususnya data-data yang berakitan dengan hasil publikasi Kabupaten Gorontalo tahun 2019.

### **Teknik Analisis Data**

#### *Tipologi Klassen*

Alat analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengidentifikasi sektor, subsektor, usaha, atau komoditi prioritas atau unggulan suatu daerah dan digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi suatu daerah, tipologi ini diharapkan dapat memperjelas dan memperkuat hasil analisis. Klasifikasi Tipologi Klassen berdasarkan pendekatan sektoral adalah sebagai berikut:

**Kuadran I** : Merupakan sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat. Kuadran ini merupakan sektor dengan laju pertumbuhan PDRB (gi) yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan daerah yang menjadi acuan secara nasional (g) dan memiliki kontribusi terhadap PDRB (si) yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan secara nasional (s). Klasifikasi ini biasa

dilambangkan dengan  $g_i > g$  dan  $s_i > s$ . Sektor dalam kuadran I dapat pula diartikan sebagai sektor yang potensial karena memiliki kinerja laju pertumbuhan ekonomi dan pangsa pasar yang lebih besar daripada daerah yang menjadi acuan secara nasional.

**Kuadran II** : Merupakan sektor maju tapi tertekan. Sektor yang berada pada kuadran ini memiliki nilai laju pertumbuhan PDRB ( $g_i$ ) yang lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan secara nasional ( $g$ ), tetapi memiliki kontribusi terhadap PDRB daerah ( $s_i$ ) yang lebih besar dibandingkan kontribusi nilai sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan secara nasional ( $s$ ). Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan  $g_i < g$  dan  $s_i > s$ . Sektor dalam kategori ini juga dapat dikatakan sebagai sektor yang telah jenuh.

**Kuadran III** : Merupakan sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat. Kuadran ini merupakan kuadran untuk sektor yang memiliki nilai laju pertumbuhan PDRB ( $g_i$ ) yang lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan secara nasional ( $g$ ), tetapi kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB ( $s_i$ ) lebih kecil dibandingkan dengan nilai kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan secara nasional ( $s$ ). Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan  $g_i > g$  dan  $s_i < s$ . Sektor dalam kuadran III dapat diartikan sebagai sektor yang sedang *booming*, meskipun pangsa pasar daerahnya relatif lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata nasional.

**Kuadran IV** : Merupakan sektor relative tertinggal. Pada kuadran ini ditempati oleh sektor yang memiliki nilai laju pertumbuhan PDRB ( $g_i$ ) yang lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan secara nasional ( $g$ ) dan sekaligus memiliki kontribusi terhadap PDRB ( $s_i$ ) yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan secara nasional.

**Tabel 2**

**Klasifikasi Analisis Tipologi Klassen**

	Rata-rata Kontribusi Sektoral		
Rata-rata Pertumbuhan Sektoral		$G_i > G$	$G_i < G$

$S_i > S$	Sektor Yang Maju Dan Tumbuh Dengan Pesat	Maju Tapi Tertekan
$S_i < S$	Sektor Potensial Atau Masih Dapat Berkembang Dengan Pesat	Sektor Relative Tertinggal

Keterangan:

- Gi = Pertumbuhan sektor I di wilayah analisis
- G = pertumbuhan sektor I di wilayah referensi
- Si = Kontribusi sektor I di wilayah analisis
- S = Kontribusi sektor I di wilayah referensi

*Location Quotient (LQ)*

*Location Quotient (LQ)* adalah suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor/industri di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor/industri tersebut secara nasional.<sup>1</sup> Analisis LQ digunakan untuk menentukan sektor apa saja yang merupakan sektor basis dan non basis. Suatu indikator yang menunjukkan kekuatan peranan suatu sektor dalam suatu daerah (Kabupaten/Kota) dibandingkan dengan peranan sektor yang sama di daerah acuan yang lebih luas sebagai referensi (Provinsi).

Rumus *Location Quotient (LQ)*:

$$LQ_{ij} = \frac{X_{ij}/RV_j}{X_i/RV}$$

Keterangan :

- LQ<sub>ij</sub> = Indeks/Koefisien *Location Quotient* sektor i di Kabupaten/Kota j
- X<sub>ij</sub> = PDRB sektor i di kabupaten/kota j
- X<sub>i</sub> = PDRB sektor i di Provinsi
- RV<sub>j</sub> = Total PDRB kabupaten/kota
- RV = Total PDRB Provinsi

Apabila hasil perhitungannya menunjukkan  $LQ > 1$ , berarti merupakan sektor basis dan berpotensi untuk ekspor, sedangkan  $LQ < 1$ , berarti bukan sektor basis (sektor lokal), dan jika  $LQ = 1$ , berarti sektor tersebut di wilayah studi dan juga di wilayah referensi memiliki peningkatan.

*Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)*

---

<sup>1</sup> Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2015, hal. 82

Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) adalah membandingkan pertumbuhan suatu kegiatan baik dalam skala yang lebih luas maupun didalam skala yang lebih kecil. Model rasio pertumbuhan ini digunakan untuk melihat deskripsi dari kegiatan ekonomi, terutama struktur ekonomi daerah penelitian, yang lebih menekankan pada kriteria pertumbuhan. Model MRP dapat digunakan untuk menentukan sektor ataupun subsektor unggulan berdasarkan pertumbuhan PDRB. Terdapat dua rasio pertumbuhan dalam analisis tersebut, yaitu rasio pertumbuhan wilayah studi (RPs) dan rasio wilayah referensi (RPr).

1. Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPs)

Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPs) adalah perbandingan antara laju pertumbuhan kegiatan i di wilayah studi (Kabupaten/Kota) dengan laju pertumbuhan kegiatan i di wilayah referensi(Provinsi Gorontalo).

Rumus Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPs) :

$$RPs = \frac{\Delta E_{ij}/E_{ij}}{\Delta E_{ir}/E_{ir}} \dots\dots\dots$$

Keterangan :

$\Delta E_{ij}$  = perubahan pendapatan kegiatan i di wilayah studi

$E_{ij}$  = pendapatan kegiatan i di wilayah studi pada awal tahun penelitian

$\Delta E_{ir}$  = perubahan pendapatan kegiatan i di wilayah referensi

$E_{ir}$  = pendapatan kegiatan i di wilayah referensi pada awal tahun penelitian

Jika nilai RPs > 1 dikatakan positif (+), artinya menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor pada tingkat wilayah studi lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan sektor pada wilayah referensi.

Jika nilai RPs < 1 dikatakan negatif (-), artinya menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor pada tingkat wilayah studi lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan sektor pada wilayah referensi.

2. Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPr)

Rasio Pertumbuhan Wilayah (RPr) merupakan perbandingan laju pertumbuhan pendapatan kegiatan i di wilayah referensi (Provinsi Gorontalo) dengan laju pertumbuhan total kegiatan (PDRB) wilayah referensi (Provinsi Gorontalo).

Rumus Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPr) :

$$RPs = \frac{\Delta E_{ir}/E_{ir}}{\Delta E_r/E_r} \dots\dots\dots$$

Keterangan :

$\Delta E_r$  = Perubahan pendapatan kegiatan i wilayah referensi

$E_r$  = PDRB wilayah referensi pada awal tahun penelitian

$\Delta E_{ir}$  = Perubahan PDRB di wilayah referensi

$E_{ir}$  = Pendapatan kegiatan  $i$  wilayah referensi pada awal tahun penelitian

Jika  $RPr > 1$  dikatakan positif (+), artinya menunjukkan bahwa pertumbuhan suatu sektor tertentu dalam wilayah referensi lebih besar daripada pertumbuhan PDRB total wilayah referensi.

Jika nilai  $RPr < 1$  dikatakan negatif (-), artinya menunjukkan bahwa pertumbuhan suatu sektor tertentu dalam wilayah referensi lebih kecil daripada pertumbuhan PDRB total wilayah referensi.

Terdapat 4 kategori dalam model rasio pertumbuhan, yaitu:

- a.  $RPs$  dan  $RPr$  memiliki nilai (+), berarti kegiatan tersebut pada tingkat wilayah referensi maupun tingkat wilayah studi pertumbuhannya menonjol.
- b. Nilai  $RPs$  (-) dan  $RPr$  (+), berarti kegiatan tersebut pada tingkat wilayah referensi pertumbuhannya menonjol dan pada tingkat wilayah studi pertumbuhannya belum menonjol.
- c. Nilai  $RPs$  (+) dan  $RPr$  (-), berarti kegiatan tersebut pada tingkat wilayah referensi pertumbuhannya belum menonjol dan pada tingkat wilayah studi pertumbuhannya menonjol.
- d.  $Rps$  dan  $RPr$  memiliki nilai (-), berarti kegiatan tersebut pada tingkat wilayah referensi maupun wilayah studi pertumbuhannya belum menonjol.

#### *Analisis Overlay*

*Analisis Overlay* ini digunakan untuk menentukan sektor atau kegiatan ekonomi yang potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kriteria kontribusi dengan menggabungkan hasil dari Metode Rasio Pertumbuhan (MRP) dan *Location Quontient* (LQ). Terdapat empat kemungkinan atau penilaian dalam metode ini, yaitu:

- a. Jika  $RPs$  (+) dan LQ (+), menunjukkan bahwa kegiatan itu sangat dominan baik dari pertumbuhan maupun dari kontribusi.
- b. Jika  $RPs$  (+) dan LQ (-), menunjukkan bahwa kegiatan itu pertumbuhannya baik, tetapi kontribusinya kecil. Dengan demikian, perlu ada peningkatan kontribusi untuk dapat menjadi kegiatan yang dominan.
- c. Jika  $RPs$  (-) dan LQ (+), menunjukkan bahwa kegiatan itu pertumbuhannya kecil, sedangkan kontribusinya sangat besar. Ada kemungkinan kegiatan ini sedang mengalami penurunan.

d. Jika RPs (-) dan LQ (-), menunjukkan bahwa kegiatan itu tidak potensial baik dari pertumbuhan maupun dari kontribusinya.

*Analisis Keuangan Daerah*

Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui kondisi umum keuangan daerah Kabupaten Pohuwato adalah derajat desentralisasi dan rasio ketergantungan daerah. Derajat desentralisasi menunjukkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Formula yang digunakan untuk mengukur derajat desentralisasi adalah  $[\text{PAD} \div \text{Total Pendapatan Daerah}] \times 100\%$ . Derajat desentralisasi memberikan pengertian bahwa semakin tinggi PAD maka semakin besar kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja pemerintah daerah untuk menjalankan roda pemerintahan. Kriteria ukuran derajat desentralisasi adalah :

1. 0-10% (sangat kurang);
2. 10,1- 20%(kurang);
3. 20,1-30%(sedang);
4. 30,1-40% (cukup);
5. 40,1-50% (baik);dan
6. > 50% (sangat baik).

Rasio ketergantungan daerah dihitung dengan formula berikut:  $(\text{Pendapatan Transfer} \div \text{Total Pendapatan Daerah}) \times 100\%$ . Semakin tinggi rasio ketergantungan daerah, itu berarti bahwa semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau provinsi. Sementara itu, rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan menggunakan formula berikut:  $[\text{PAD} \div (\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman})] \times 100\%$ . Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerahnya. Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah disajikan dalam tabel berikut:

<b>Prosentase</b>	<b>Ketergantungan Keuangan Daerah</b>
0,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Tinggi

> 50,00	Sangat Tinggi
---------	---------------

**Hasil Penelitian**

*Hasil Tipologi Klassen*

Berdasarkan dari hasil analisis menggunakan Tipologi Klassen, diketahui ada satu sektor yang termasuk dalam kuadran I (sektor yang maju dan tumbuh pesat), dua sektor masuk pada kuadran II (maju tapi tertekan), tiga sektor masuk pada kuadran III (sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat), dan sebelas sektor pada kuadran IV (sektor relatif tertinggal).

Tabel 4

Hasil Analisis Tipologi Klassen

Rata-rata Pertumbuhan Sektoral	Rata-rata Kontribusi Sektoral	$G_i > S$	$G_i < G$
	$S_i > S$	Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan; Industri Pengolahan	Jasa Keuangan Dan Asuransi, Jasa Pendidikan,
	$S_i < S$	Pengadaan Listrik Dan Gas, Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor, Jasa Keuangan Dan Asuransi, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib,	Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan, Pertambangan Dan Penggalian, industry pengolahan, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang; kontruksi; Transportasi Dan Perdagangan, Informasi Dan Komunikasi, Jasa Perusahaan, Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial, Jasa Lainnya.

**Hasil Location Quotient (LQ)**

Berdasarkan hasil perhitungan LQ, Kabupaten Pohuwato memiliki 2 sektor yang merupakan sektor basis, yaitu: (1) Pertambangan Dan Penggalian, dan Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial.

**Tabel 5**  
**Hasil *Location Quotient* (LQ)**

	<b>Lapangan Usaha</b>	<b>Hasil LQ</b>	<b>Ket.</b>
<b>A</b>	Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan	0,001209	NB
<b>B</b>	Pertambangan Dan Penggalian	2,332802	B
<b>C</b>	Industri Pengolahan	0,904971	NB
<b>D</b>	Pengadaan Listrik Dan Gas	0,927064	NB
<b>E</b>	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	0,167975	NB
<b>F</b>	Konstruksi	0,437654	NB
<b>G</b>	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	0,705336	NB
<b>H</b>	Transportasi Dan Pergudangan	0,342743	NB
<b>I</b>	Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	0,233713	NB
<b>J</b>	Informasi Dan Komunikasi	0,258779	NB
<b>K</b>	Jasa Keuangan Dan Asuransi	0,23666	NB
<b>L</b>	Real Estate	0,21238	NB
<b>MN</b>	Jasa Perusahaan	0,548535	NB
<b>O</b>	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	0,415192	NB
<b>P</b>	Jasa Pendidikan	0,296601	NB
<b>Q</b>	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	12405052	B
<b>R,S,T,U</b>	Jasa Lainnya	0,473075	NB

*Hasil Olahan*

### **Hasil Model Rasio Pertumbuhan (MRP)**

Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) adalah membandingkan pertumbuhan suatu kegiatan baik dalam skala yang lebih luas maupun didalam skala yang lebih kecil. Dari hasil penelitian diketahui bahwa sektor Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan masuk kedalam kategori kegiatan yang pada tingkat wilayah referensi pertumbuhannya menonjol dan pada tingkat wilayah studi pertumbuhannya belum menonjol. Dan terdapat enam sektor (Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik Dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang; Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib) yang termasuk dalam kategori



kegiatan yang pada tingkat wilayah referensi pertumbuhannya belum menonjol dan pada tingkat wilayah studi pertumbuhannya menonjol.

**Tabel 5**  
**Hasil Model Rasio Pertumbuhan (MRP)**

<b>Kategori Sektor</b>	<b>RP<sub>s</sub></b>	<b>RP<sub>r</sub></b>
A	-	-
B	+	+
C	-	-
D	+	+
E	-	+
F	+	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-
K	-	-
L	+	-
MN	-	+
O	+	-
P	+	-
Q	-	-
R,S,T,U	-	-

*Hasil Olahan*

### **Hasil Overlay**

Analisis *Overlay* digunakan untuk menentukan sektor atau kegiatan ekonomi yang potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kriteria kontribusi dengan menggabungkan hasil dari Metode Rasio Pertumbuhan (MRP) dan *Location Quotient* (LQ). Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa sektor Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan, dan sektor Pengadaan Listrik Dan Gas masuk kedalam kategori kegiatan yang sangat dominan baik dari pertumbuhan maupun dari kontribusi.

**Tabel 6**  
**Hasil Overlay**

<b>MRP</b>	<b>LQ</b>	<b>KATEGORI OVERLAY</b>
-	-	D
+	+	A
-	-	D
+	-	B
+	-	B
-	-	D
-	-	D
-	-	D
-	-	D
-	-	D
-	-	D
-	-	D
-	-	D
+	-	B
-	-	D
-	-	D
-	+	C
-	-	D

### **Pembahasan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Pohuwato**

Kabupaten Pohuwato merupakan kabupaten yang berada di ujung barat Provinsi Gorontalo dengan letak Geografis antara 0o 22' - 0o 57' Lintang Utara dan 121o 23' - 122o 19' Bujur Timur. Kabupaten Pohuwato berbatasan dengan Kabupaten Buol di sebelah utara, berbatasan dengan Teluk Tomini di sebelah selatan, berbatasan dengan Kabupaten Parigi Moutong di sebelah barat dan berbatasan dengan Kabupaten Boalemo di sebelah timur. Berdasarkan data dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan, Kabupaten Pohuwato memiliki luas wilayah sebesar 4.244,31 Km<sup>2</sup> atau 34,75% dari luas wilayah Provinsi Gorontalo dan menjadikan Kabupaten Pohuwato sebagai Kabupaten terluas di Provinsi Gorontalo. Kabupaten ini terbagi menjadi 13 kecamatan dengan ibukota kabupaten terletak di Kecamatan Marisa

### **Produk Domestik Regional Bruto**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memerhatikan apakah faktor produksi dimiliki residen atau nonresiden. Penyusunan PDRB bisa disajikan berdasarkan atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK).

Harga Berlaku adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tahun sedang berjalan. Sedangkan harga Konstan adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tetap disatu tahun dasar. Tahun Dasar adalah tahun terpilih sebagai referensi statistik, yang digunakan sebagai dasar penghitungan tahun-tahun yang lain. Dengan tahun dasar tersebut dapat digambarkan seri data dengan indikator rinci mengenai perubahan/pergerakan yang terjadi.

Berikut adalah Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kab. Pohuwato tahun 2015-2019

**Tabel 8.2** **Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pohuwato (miliar rupiah), 2015–2019**  
**Gross Regional Domestic Product at 2010 Constant Market Prices by Industry (billion rupiahs) in Pohuwato Regency, 2015–2019**

Lapangan Usaha/Industry	2015	2016	2017	2018 *	2019 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	2 048,91	2 183,87	2354,35	2 519,95	2 671,14
B Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	38,53	37,12	36,8	36,8	38,57
C Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	154,49	163,99	169,15	178,78	194,23
D Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	2,2	2,57	2,82	3,08	3,37
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	0,89	1,02	1,18	1,32	1,49
F Konstruksi/ <i>Construction</i>	238,71	253,71	259,16	264,78	270,05
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	344,25	377,67	415,97	458,62	513,99
H Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	120,15	128,4	135,84	142,52	150,18
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	39,99	43,53	47,56	51,62	55,1
J Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	53,05	58,45	64,43	70,34	75,13

Lanjutan Tabel/Continued Table 8.2

Lapangan Usaha/Industry	2015	2016	2017	2018 *	2019 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
K Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	67,74	81,33	89,46	93,11	92,35
L Real Estat/Real Estate Activities	32,66	35,39	37,1	38,96	42,09
M,N Jasa Perusahaan/Business Activities	3,35	3,55	3,73	3,91	4,11
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	213,05	213,08	213,23	215,45	220,74
P Jasa Pendidikan/Education	85,2	88,39	93,56	101,1	110,12
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	89,44	96,94	101,75	108,01	116,78
R,S,T,U Jasa Lainnya/Other Services Activities	45,23	46,57	48,2	49,87	51,6
<b>Produk Domestik Bruto/ Gross Domestic Product</b>	<b>3 577,85</b>	<b>3 815,58</b>	<b>4 074,28</b>	<b>4 338,23</b>	<b>4 611,06</b>

Catatan/Note: \*Angka Sementara/Preliminary Figures  
\*\* Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures  
Sumber/Source: Badan Pusat Statistik/BPS-Statistics

Laju perhitungan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar Harga Konstan. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Pohuwato tahun 2019 yaitu sebesar 6,29%. Sebagaimana dilihat dalam tabel dibawah ini pertumbuhan ekonomi Kab. Pohuwato dari tahun 2016-2019 mengalami fluktuasi,

**Gambar 12.1** Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Kabupaten Pohuwato (persen), 2016-2019  
*Growth Rate of Gross Regional Domestic Product at 2010 Constant Market Prices in Pohuwato Regency (percent), 2016-2019*



Sumber/Source: BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources

### **PDRB Perkapita**

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Pohuwato atas dasar harga berlaku sejak tahun 2015 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 PDRB per kapita tercatat sebesar 31,11 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 41,04 juta rupiah (lihat tabel 1.4).

**Tabel 14. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per Kapita Kabupaten Pohuwato, Tahun 2015-2019**

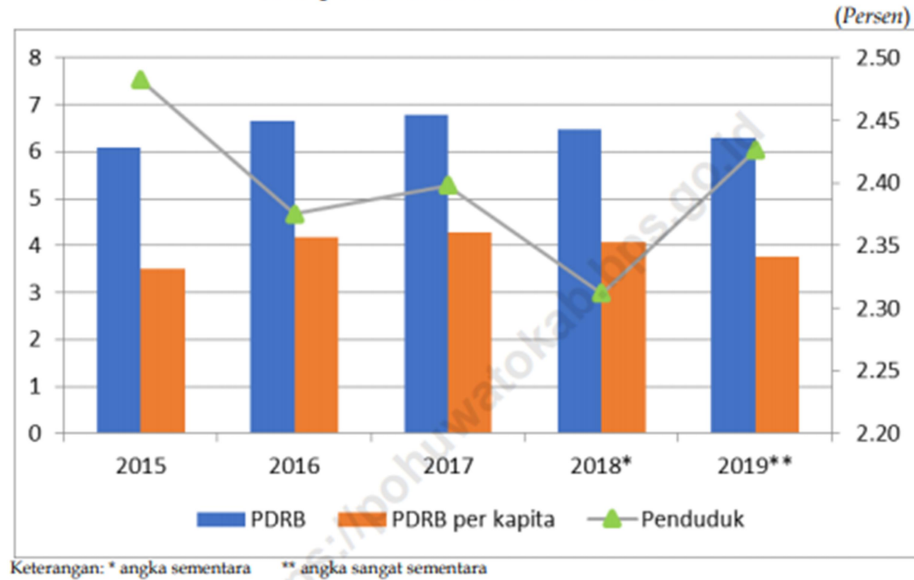
Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Nilai PDRB (Miliar Rp)</b>					
a. Atas Dasar Harga Berlaku	4.569,63	5.118,66	5.576,61	6.083,67	6.622,90
b. Atas Dasar Harga Konstan 2010	3.577,85	3.815,58	4.074,28	4.338,23	4.611,06
<b>PDRB per Kapita (Ribu Rp)</b>					
a. Atas Dasar Harga Berlaku	31.107,94	34.037,06	36.213,85	38.613,96	41.040,96
b. Atas Dasar Harga Konstan 2010	24.356,33	25.372,06	26.457,90	27.535,41	28.573,92
<b>Pertumbuhan</b>					
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 (%)	3,51	4,17	4,28	4,07	3,77
Jumlah Penduduk (000 Orang)	146,90	150,39	153,99	157,55	161,37
Pertumbuhan (%)	2,48	2,38	2,40	2,31	2,43

Keterangan: \* angka sementara \*\* angka sangat sementara

PDRB per kapita Kabupaten Pohuwato menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (Tabel 14), seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Pohuwato rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut. Sementara itu, pertumbuhan per kapita secara "riil" juga selalu meningkat di kisaran 3-4 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat rata-rata pada kisaran 2,40 persen setiap tahunnya

selama periode 2015 s.d. 2019. Dengan demikian, maka pertumbuhan per kapita tersebut tidak saja terjadi secara "riil" tetapi juga terjadi secara kualitas.

**Gambar 2. Pertumbuhan PDRB, PDRB per Kapita, dan Jumlah Penduduk Kabupaten Pohuwato, Tahun 2015-2019**



Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Pengeluaran makanan perkapita di Kabupaten Pohuwato mengalami penurunan dari Rp 424.963/bulan pada tahun 2017 menjadi Rp 400.224/bulan pada tahun 2018. Jika dirinci berdasarkan kelompok bahan makanan, pengeluaran terbesar di Kabupaten Pohuwato pada tahun 2018 yaitu pada kelompok makanan dan minuman jadi sebesar Rp 90.630 sedangkan terkecil pada kelompok umbi-umbian yaitu sebesar Rp 2.718.

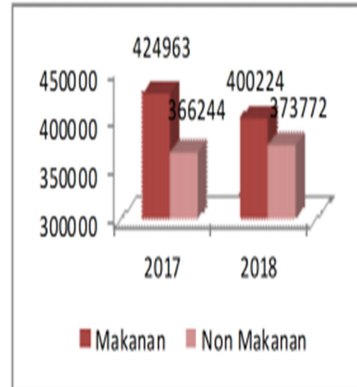
Pengeluaran non-makanan penduduk Kabupaten Pohuwato pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari Rp 366.244 pada tahun 2017 menjadi Rp 373.772 pada tahun 2018 atau naik sebesar 2,05 persen. Selain itu pada tahun 2018 proporsi pengeluaran makanan dan non-makanan menunjukkan bahwa pengeluaran makanan lebih besar yaitu sebesar 51,71 persen. Kondisi ini sama seperti pada tahun 2017 dimana proporsi pengeluaran makanan lebih besar yaitu sekitar 53,71 persen. Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan dapat dilihat pada tabel dibawah,

**Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Sebulan (Rupiah) Menurut Kelompok Bahan Makanan di Kabupaten Pohuwato, 2017-2018**

Bahan Makanan	2017	2018
Padi-padian	59 625	66 415
Umbi-umbian	6 501	2 718
Ikan	50 885	51 165
Daging	11 900	7 595
Telur dan susu	17 723	18 305
Sayur-sayuran	42 551	35 433
Kacang-kacangan	5 257	4 510
Buah-buahan	14 667	12 769
Minyak dan lemak	11 987	11 756
Bahan minuman	14 957	13 339
Bumbu-bumbuan	11 008	11 026
Konsumsi lainnya	6 683	5 399
Makanan dan minuman jadi	97 307	90 630
Tembakau dan Sirih	73 903	69 173
<b>Total</b>	<b>424 963</b>	<b>400 224</b>

Sumber : BPS Kabupaten Pohuwato

**Pengeluaran Makanan dan Non-makanan di Kabupaten Pohuwato, 2017-2018**



Sumber : BPS Kabupaten Pohuwato

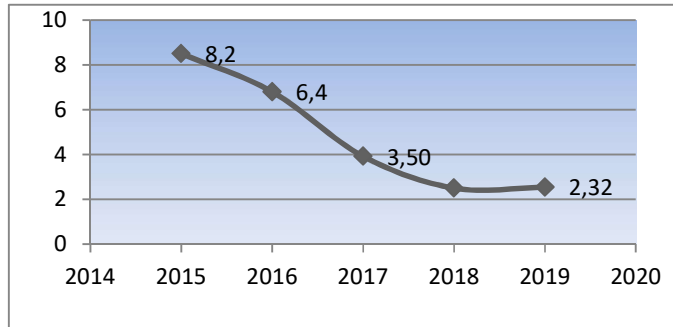
## Inflasi

Inflasi (untuk daerah perkotaan) merupakan salah satu indikator makro yang perkembangannya dimonitor secara ketat oleh pemerintah, karena besaran agregat inflasi secara langsung akan berdampak terhadap daya beli masyarakat berpendapatan tetap seperti pegawai negeri dan buruh/pekerja swasta. Inflasi terjadi akibat ketidakseimbangan antara sisi permintaan dan penawaran pasar barang dan jasa. Inflasi dapat terjadi oleh berbagai faktor seperti nilai tukar/kurs, volume uang beredar, bahkan dampak dari ekspektasi masyarakat. Dimensi lain yang terkena dampak negatif dari tingginya inflasi adalah meningkatnya nominal garis kemiskinan dan melemahnya *purchasing power parity* yang pada akhirnya akan berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. . Inflasi



Kabupaten Pohuwato pada setiap tahun mengalami fluktuasi dan berada pada trend penurunan. Pada tahun 2019 laju inflasi di Kabupaten Pohuwato sebesar 2,32%.



### **Keuangan Daerah**

Dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini, setiap pemerintah daerah memiliki peran serta tanggung jawab untuk mengelola pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran dan tanggung jawab tersebut diwujudkan dengan mengelola secara efektif dan efisien sumber pendanaan, baik melalui penyerahan kewenangan perpajakan dan retribusi daerah dan skema transfer. Pemerintah daerah selanjutnya mengelola dana dalam APBD. Pengelolaan dana tersebut secara simultan dijadikan instrumen kunci bagi pelaksanaan kebijakan publik. APBD ditetapkan dengan persetujuan DPRD.

Realisasi pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato tahun 2018 mengalami peningkatan. Realisasi penerimaan tahun 2019 tercatat senilai 904,69 milyar rupiah. Komponen terbesar penerimaan daerah Pohuwato bersumber dari Pendapatan Transfer sebanyak 91,56 persen sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya memberikan kontribusi 5,76 persen. Nilai realisasi PAD tahun 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya, yaitu dari 69,39 milyar di 2017 menjadi 52,15 milyar di 2018.

**Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018**

<b>Uraian</b>	<b>Realisasi (Juta Rupiah)</b>	<b>Persentase</b>
Pendapatan Asli Daerah	52 151,70	5,76
Pendapatan Transfer	828 345,87	91,56
Lain-lain Pendapatan yang Sah	24 194,36	2,67
<b>Total</b>	<b>904 691,93</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Pohuwato Dalam Angka 2019

**Tabel 4.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2018-2019 (000 Rp)**

<b>Jenis Pendapatan</b>	<b>2018</b>	<b>2019*)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1,457,052,397</b>	<b>1,496,156,132</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>147,992,401</b>	<b>142,585,897</b>
Pajak Daerah	27,456,459	25,967,109
Retribusi Daerah	9,099,112	5,651,358
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4,581,761	4,581,761
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	106,855,069	106,385,669
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1,002,264,189</b>	<b>1,006,387,802</b>
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	10,620,146	11,827,617
Dana Alokasi Umum (DAU)	653,986,983	675,236,653
Dana Alokasi Khusus (DAK)	337,657,060	319,323,532
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>306,795,807</b>	<b>347,182,433</b>
Pendapatan Hibah	54,823,200	54,948,300
Dana Darurat	-	-
Dana Bagi Hasil dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	38,023,438	43,298,268
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	211,949,169	248,935,865
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	2,000,000	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-

Data APBD\*

## **Ketenagakerjaan**

Aspek ketenagakerjaan merupakan aspek pokok dalam pembahasan kesejahteraan penduduk. Dalam pembahasan ketenagakerjaan berkaitan dengan pengertiannya maka tidak bisa terlepas dari konsep Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja, Bukan Angkatan Kerja, Tingkat Kesempatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran, sedangkan Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menggambarkan persentase penduduk 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja.

### **3.2 KETENAGAKERJAAN EMPLOYMENT**

**Tabel 3.2.1** Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pohuwato, 2019  
*Population Aged 15 Years and Over by Type of Activity During The Previous Week and Sex in Pohuwato Regency, 2019*

Kegiatan Utama <i>Main Activity</i>	Jenis Kelamin (Jiwa) <i>Sex (People)</i>		
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Angkatan Kerja/<i>Economically Active</i></b>	<b>51 958</b>	<b>28 446</b>	<b>80 404</b>
Bekerja/ <i>Working</i>	50 846	27 193	78 039
Pengangguran Terbuka/ <i>Unemployment</i>	1 112	1 253	2 365
<b>Bukan Angkatan Kerja/<i>Economically Inactive</i></b>	<b>6 655</b>	<b>28 565</b>	<b>35 220</b>
Sekolah/ <i>Attending School</i>	2 859	4 135	6 994
Mengurus Rumah Tangga/ <i>Housekeeping</i>	1 513	23 136	24 649
Lainnya/ <i>Others</i>	2 283	1 294	3 577
<b>Jumlah/<i>Total</i></b>	<b>58 613</b>	<b>57 011</b>	<b>115 624</b>
<b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) <i>Economically Active Participation Rate</i></b>	<b>88,64</b>	<b>49,89</b>	<b>69,54</b>
<b>Tingkat Pengangguran <i>Unemployment Rate</i></b>	<b>2,14</b>	<b>4,40</b>	<b>2,94</b>

Sumber/Source: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2019/BPS-Statistics, National Labor Force Survey in August 2019

## **Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan permasalahan mendasar yang bersifat mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, strategis, dan komprehensif. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran dengan metodologi yang valid dan dapat diperbandingkan antar waktu dan wilayah. Jika dilihat dari Garis kemiskinan, Jumlah dan Presentase Penduduk miskin Kabupaten Pohuwato di tahun 2019 sebesar 275,240 Garis Kemiskinan, sebesar 29,13 Jumlah Penduduk dan sebesar 18,16 untuk presentase Penduduk Miskin. Sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 4.5.1** **Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Pohuwato, 2019**  
**Table 4.5.1** **Poverty Line and Number of Poor People in Pohuwato Regency, 2019**

Tahun Year	Garis Kemiskinan Poverty Line (rupiah)	Penduduk Miskin Number of Poor People	
		Jumlah (ribu jiwa) Total(thousand people)	Persentase Percentage
(1)	(2)	(3)	(4)
2007	147 750	31,30	29,74
2008	158 393	24,50	23,28
2009	183 215	22,49	21,15
2010	194 335	24,20	18,73
2011	210 033	28,51	21,58
2012	211 204	27,68	20,18
2013	212 629	30,19	21,47
2014	214 146	29,85	20,69
2015	222 996	32,70	22,43
2016	238 364	31,66	21,17
2017	247 476	32,56	21,27
2018	263 617	30,39	19,40
2019	275 240	29,13	18,16

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik/BPS-Statistics

## **Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur

dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Jika dilihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia tahun 2019, Kabupaten Pohuwato menempati peringkat ke empat, diantara Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo dengan nilai IPM sebesar 65,27 Sebagaimana dalam tabel dibawah ini

**4.6 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA  
HUMAN DEVELOPMENT INDEX**

**Tabel 4.6.1** Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Gorontalo, 2019  
*Human Development Index (HDI) by Regency/Municipality in Gorontalo Province, 2019*

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Kabupaten/Regency</b>					
Boalemo	62,86	63,42	64,22	64,99	65,53
Gorontalo	63,63	64,22	64,95	65,78	66,69
Pohuwato	62,50	63,17	63,88	64,44	65,27
Bone Bolango	66,83	67,48	68,11	69,06	69,63
Gorontalo Utara	62,55	63,02	63,52	64,06	64,52
<b>Kota/Municipality</b>					
Gorontalo	75,62	75,75	76,09	76,53	77,08
<b>Provinsi Gorontalo</b>	<b>65,86</b>	<b>66,29</b>	<b>67,01</b>	<b>67,71</b>	<b>68,49</b>

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik/BPS-Statistics

**Rasio Gini**

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selamanya dapat secara langsung mengentaskan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi tinggi bila tidak diikuti oleh pemerataan distribusi pendapatan tidak akan berdampak pada masyarakat bawah karena sebagian besar pendapatan dikuasai oleh sekelompok kecil masyarakat "elit" sedangkan sebagian masyarakat lain yang berpendapatan rendah tetap berada dalam keadaan miskin. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan yakni dengan menggunakan rasio gini.

Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya, semakin mendekati 0 distribusi pendapatan penduduk semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna. Nilai 0,5-0,7 menggambarkan ketidakmerataan tinggi; 0,36-0,49 ketidakmerataan sedang; dan 0,20-0,35 mengalami ketidakmerataan rendah.

Data Gini Ratio yang diperoleh terakhir dari Badan Pusat Statistik adalah sampai dengan tahun 2017. Kabupaten Pohuwato memiliki nilai Gini Ratio pada tahun 2017 sebesar 0,409 yang berada pada kategori "Ketidakmerataan Sedang". Dilihat dari Skala Provinsi Kabupaten Gorontalo berada pada urutan ke-4 nilai gini ratio se Provinsi Gorontalo.

**Tabel 6. Gini Ratio Menurut Kabupaten / Kota Provinsi Gorontalo**

Kabupaten / Kota	Gini Ratio					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kab. Boalemo	0.485	0.419	0.377	0.418	0.380	0.386
Kab. Gorontalo	0.426	0.452	0.444	0.433	0.438	0.391
Kab. Pohuwato	0.364	0.363	0.341	0.315	0.373	0.409
Kab. Bone Bolango	0.431	0.387	0.403	0.407	0.395	0.400
Kab. Gorontalo Utara	0.354	0.413	0.404	0.382	0.371	0.425
Kota Gorontalo	0.335	0.391	0.421	0.417	0.381	0.421
Provinsi Gorontalo	0.419	0.431	0.427	0.423	0.419	0.430

Sumber : Data BPS Provinsi Gorontalo, 2018

## **Daftar Pustaka**

Badan Pusat Statistik Gorontalo

BPS. (2019). *Kabupaten Pohuwato Dalam Angka 2019*. Pohuwato: Badan Pusat Statistik Kabupaten

BPS. (2020). *Kabupaten Pohuwato Dalam Angka 2020*. Pohuwato: Badan Pusat Statistik Kabupaten

Grossman, G.M. and Helpman E. (1994). *Endogenous Innovation in The Theory of Growth*. Journal of Economic Perspectives, 8, 23-44.

Jhingan, M. L. (1999). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* (terjemahan), Edisi Ketujuh. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Leichenko, Robin M. 2000. *Export, Employment and Production: A Causal Assessment of US and Regions*. Economics Geography Vol.76 No.4, Oktober, 303-325.

Mankiw, N. G. (2011). *Principles of Economics*, Sixth Edition. South-Western Cengage Learning.

Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Kabupaten Pohuwato 2015-2019.

Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pohuwato 2015-2019

Render, B, et al. (2006). *Quantitative Analysis for Management*. Australia: Pearson Prentice Hall.

Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2015, hal. 82

Saaty, TL. (1990) *Decision Making for Leaders: The Analytic Hierarchy Process for Decision in a Complex Word*. USA: University of Pittsburgh.

- Widodo, T. (2006). *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Yamit, Z. (1994). *Manajemen Kuantitatif untuk Bisnis (Operation Research)*. Yogyakarta: BPFE
- Zikmund, W.G. (2001). *Business Research Method*, Forth Word: Harcourt Inc.